

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
TAHUN 2018**



**DINAS KESEHATAN
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018**

BAB I
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan Negara dengan mengacu kepada Undang - Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang keuangan negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN, maka diperlukan system pengendalian intern dalam mengelola keuangan Negara/ daerah. Mengingat pentingnya system pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Di dorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah, sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP, agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
6. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/ terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan atau/ mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan ditingkat Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan tahun 2017.

BAB II

SEKILAS TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

A. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem pengendalian intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/ kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/ fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektifitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.

C. Unsur-Unsur dalam SPIP

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkomitmen memahami tanggungjawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan prilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai tone at the top (penentu "irama" organisasi)

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- Diutamakan pada kegiatan/ tujuan pokok Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang
- Dikaitkan dengan proses penilaian risiko
- Disesuaikan dengan sifat khusus Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang
- Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis
- Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan, serta
- Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola dan mengendalikan kegiatan instansi.

Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung- jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggungjawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan- perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan Menteri/ Pimpinan Lembaga/Gubernur/ Bupati/ kepala satuan kerja perangkat daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan .

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa

konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/ tujuan sampai dengan pemantuan penyelenggaraan pengendalian serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana tindak pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP, hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas rencana tindak pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan penciptaan lingkungan pengendalian yang baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur- unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektifitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/ buruk menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai- nilai etika
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, diperoleh gambaran sebagai berikut:

| No | Sub Unsur | Kondisi |
|----|---|---------------|
| 1 | Penegakan Integrasi dan nilai etika | Cukup Memadai |
| 2 | Komitmen terhadap kompetensi | Cukup Memadai |
| 3 | Kepemimpinan yang kondusif | Cukup Memadai |
| 4 | Struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan | Cukup Memadai |
| 5 | Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat | Cukup Memadai |
| 6 | Kebijakan pengembangan SDM | Cukup Memadai |
| 7 | Pengawasan internal yang efektif | Cukup Memadai |
| 8 | Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah | Cukup Memadai |

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah- langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| No | Sub Unsur | Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian |
|------|---|--|
| I | Penegakan Integrasi dan nilai etika | <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun kode etik pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang2. Mensosialisasikan kode etik pada seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang3. Membuat mekanisme penyampaian aturan dan kode etik ke pihak ketiga |
| II | Komitmen terhadap kompetensi | <ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kompetensi aparatur, khususnya pegawai Dinas Kesehatan2. Melaksanakan diklat dan sertifikasi pegawai yang menjalankan tugas khusus |
| III | Kepemimpinan yang kondusif | <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan interaksi yang intensif dengan seluruh pegawai2. Mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan |
| IV | Struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan | Evaluasi kompetensi dan kecukupan aparatur, khususnya pegawai Dinas Kesehatan |
| V | Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat | Melakukan reviu bulanan secara berjenjang terhadap kinerja aparatur dibawahnya pada masing- masing SKPD sesuai dengan peraturan tentang penilaian kinerja |
| VI | Kebijakan pengembangan SDM | Membuat instruksi Walikota untuk mendapatkan perhatian Baperjakat terkait penempatan SDM pada posisi kunci agar disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan |
| VII | Pengawasan internal yang efektif | Memberikan pembinaan dan peringatan terhadap pelanggaran- pelanggaran dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di SKPD |
| VIII | Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah | Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan peningkatan status kesehatan |

BAB IV

RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

Dalam tahun 2017 rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan- tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing serta berbasis masyarakat

Tujuan tersebut diatas tercapai apabila dilakukannya peningkatan pengembangan keluarga sadarzi, pemberian makanan tambahan dan vitamin, monev gizi, penanggulangan gizi kurang, kurang vitamin A dan gangguan Yodium.

2. Mewujudkan kualitas SDM kesehatan yang amanah, professional dan tepat guna
Tujuan tersebut tersebut tercapai apabila adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dasar.

3. Mewujudkan sitem informasi dan promosi kesehatan yang berkualitas
Tujuan dimaksud dikatakan tercapai apabila tersedianya sarana dan prasarana yang presentatif dan sesuai standar akreditasi.

4. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) pada masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat secara mandiri.

Tujuan tersebut tercapai ditandai dengan terciptanya PHBS pada masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat.

B. RISIKO- RISIKO

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko- risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. Risiko- risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh

pihak auditor dan risiko yang teridentifikasi m

elalui diskusi manajemen, yaitu:

Risiko atas pencapaian tujuan – 1 : Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing serta berbasis masyarakat

1. Masih banyaknya keluarga yang tidak sadar (sadar gizi).
2. Masih rendahnya pencapaian pemberian makanan tambahan dan vitamin untuk masyarakat gizi buruk.
3. Tidak dilaksanakannya Monitoring dan evaluasi gizi masyarakat.
4. Kurang tanggapnya petugas kesehatan dan stekholder lainnya terhadap gizi kurang, kurang vitamin A dan gangguan Yodium.

Risiko atas pencapaian tujuan – 2 : Mewujudkan kualitas SDM kesehatan yang amanah, professional dan tepat guna

1. Tidak adanya Sosialisasi peraturan perundang-undangan
2. Kurangnya bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

Risiko atas pencapaian tujuan – 3 : Mewujudkan sitem informasi dan promosi kesehatan yang berkualitas

1. Terbatasnya ketersediaan media promosi dan informasi kesehatan
2. Tidak adanya DAK Bidang Kesehatan
3. Masih adanya puskesmas yang belum terakreditasi

Risiko atas pencapaian tujuan – 4 : Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) pada masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat secara mandiri

1. Masih kurangnya penyuluhan masyarakat untuk pola hidup sehat
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

Hasil analisis atas risiko- risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko terlampir

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai dengan saat ini, Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah membangun

berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/ tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan, Pengendalian yang telah terpasang, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan keluarga sadarzi
2. Adanya pemberian makanan tambahan dan vitamin untuk masyarakat gizi kurang dan buruk
3. Melakukan monev gizi
4. Melakukan penanggulangan gizi kurang , kurang vitamin A dan gangguan Yodium
5. Melakukan sosialisai peraturan perundang-undangan tentang ASN
6. Melaksanakan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
7. Menyediakan media promosi dan informasi kesehatan, DAK bidang kesehatan
8. Meningkatkan penyuluhan masyarakat untuk pola hidup sehat dan melaksanakan promosi lewat radio sm vidiotron

D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar- benar terjadi. Sebagian kegiatan pengendalian yang dibangun didasarkan kepada rekomendasi pihak auditor.

Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun adalah sebagai berikut:

Tujuan – 1: Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing serta berbasis masyarakat

Risiko 1: Masih banyaknya keluarga yang tidak sadarzi (sadar gizi).

- Melakukan pemantauan keluarga sadarzi oleh tenaga kesehatan
- Melakukan kunjungan rumah terhadap masyarakat yang dicurigai kurang gizi

Risiko 2: Masih rendahnya pencapaian pemberian makanan tambahan dan

vitamin untuk masyarakat gizi buruk.

- Memberikan bantuan makanan tambahan dan vitamin untuk masyarakat gizi buruk

Risiko 3 : Tidak dilaksanakannya Monitoring dan evaluasi gizi masyarakat.

- Melakukan monitoring dan Evaluasi status gizi pada masyarakat

Risiko 4 : Kurang tanggapnya petugas kesehatan dan stekholder lainnya terhadap gizi kurang, kurang vitamin A dan gangguan Yodium

- Membuat komitmen dengan stekholder terkait untuk mengatasi gizi kurang , kurang vitamin A dan gangguan Yodium

Tujuan – 2: Mewujudkan kualitas SDM kesehatan yang amanah, professional dan tepat guna

Risiko 1: Tidak adanya Sosialisasi peraturan perundang-undangan

- Mengadakan sosialisai peraturan perundang-undangan terhadap SDM kesehatan

Risiko 2: Kurangnya bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

- Mengadakan bimtek atau bimbingan terknis implementasi peraturan perundang-undangan untuk SDM kesehatan

Tujuan – 3: Mewujudkan sitem informasi dan promosi kesehatan yang berkualitas

Risiko 1: Terbatasnya ketersediaan media promosi dan informasi kesehatan

- Menambah jumlah media promosi dan informasi kesehatan
- Mendistribusikan media promosi dan informasi kesehatan kepada masyarakat

Risiko 2: Tidak adanya DAK Bidang Kesehatan

- Membuat usulan DAK untuk mendukung terciptanya system informasi dan promosi kesehatan yang maksimal

Risiko 3 : Masih adanya puskesmas yang belum terakreditasi

- Melakukan pendampingan untuk menciptakan akreditasi puskesmas
- Mengadakan kunjungan kerja dan bimtek (bimbingan teknis) untuk SDM

kesehatan ke Puskesmas yang sudah akreditasi.

- Membuat rencana pembentukan Akreditasi Puskesmas dengan melibatkan semua bidang terkait

Tujuan- 4: Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) pada masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat secara mandiri

Risiko 1: Masih kurangnya penyuluhan masyarakat untuk pola hidup sehat

- Memberikan penyuluhan tentang pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat
- Melakukan survey PHBS (Perilaku Hidup bersih dan sehat) ke masyarakat

Resiko 2 : Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau berperilaku hidup bersih dan sehat dengan cara melakukan pendekatan terhadap masyarakat
- Memberikan dorongan dan semangat kepada masyarakat agar mau berperilaku hidup bersih dan sehat

BAB V

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

- Melalui Surat Pemberitahuan ke radio, videotron dan social media.
- Menyelenggarakan Sosialisasi, Seminar Peningkatan Keterampilan Kader dan Masyarakat.
- Melalui surat pemberitahuan ke sekolah TK, SD, Play Group se Kota Padang Panjang, Kader dan Masyarakat.
- Survey kepuasan pelanggan terhadap capaian program-program PHBS dan Sadarzi
- Melalui pembinaan langsung ke Kader dan masyarakat tentang PHBS dan Keluarga Sadarzi
- Mensosialisasikan dan mendistribusikan tatalaksana dan tatakelola PHBS dan Sadarzi kepada kader dan masyarakat
- Melalui Sosial Media tentang program-program PHBS dan Sadarzi.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing unit kerja pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi sebagai berikut:

- Pemantauan pelaksanaan kode etik dan perilaku petugas kesehatan
- Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM
- Evaluasi Kompetensi dan Pengetahuan Kader dalam Penereapan PHBS dan Sadarzi.
- Evaluasi capaian program PHBS dan Sadarzi
- Evaluasi keanggotaan kader yang aktif dan pasif pada masing-masing kelompok masyarakat
- Supervisi pelaksanaan pengelolaan program PHBS dan Sadarzi sesuai dengan jadwal rutin yang telah ditetapkan
- Supervisi pelaksanaan pengelolaan PHBS disekolah sesuai dengan jadwal rutin yang telah ditetapkan
- Pemantauan pelaksanaan sosialisasi SOP.
- Evaluasi penerapan Sistem Informasi Kesehatan di Lingkungan.

2. Evaluasi Terpisah

Inspektorat Kota Padang Panjang melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit- unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif

3. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/ evaluasi/ revidi dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja SKPD melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

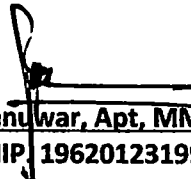
Setiap SKPD memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Walikota.

BAB VII

PENUTUP

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan statement of Responsibility dalam laporan keuangan.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PADANG PANJANG,


Drs. Nuryanwar, Apt, MM, M.Kes
Pembina / NIP. 196201231991011001

LAMPIRAN

CSA (CONTROL Self Assessment)

RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

| NO | Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Belum Memadai | Rencana Tindak Lanjut Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian | Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan | Target Waktu Penyelesaian |
|----|--|---|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Penegakan Integritas dan Nilai | | | |
| 1 | Pengembangan Integritas dan nilai etika | 1. Menyusun kode etik pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang 2. Mensosialisasikan kode etik pada seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang | BKD, Inspektorat dan Seluruh SKPD BKD dan Inspektorat | Triwulan 1 Tahun 2018 |
| 2 | Pengomunikasian nilai- nilai etika | 1. Membuat mekanisme penyampaian aturan dan kode etik ke pihak ketiga | Bagian Hukum dan Inspektorat | Akhir Tahun 2018 |
| II | Komitmen terhadap Kompetensi | | | |
| 1 | Identifikasi Kompetensi | 1. Evaluasi kompetensi aparatur, khususnya pengelola perpustakaan dan kearsipan | BKD, Inspektorat dan Seluruh SKPD | Akhir Tahun 2018 |
| 2 | Pemanfaatan individu yang | 1. Melaksanakan diklat dan sertifikasi pegawai yang | BKD | Triwulan II 2018 |

| | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|-----------------------|
| | memiliki kompetensi | menjalankan tugas khusus sesuai kompetensinya | | |
| III Struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan | | | | |
| 1 | Menjaga kelangsungan proses | Evaluasi kompetensi dan kecukupan aparatur, khususnya pengelola administrasi surat menyurat melalui e-office | BKD, Inspektorat dan Seluruh SKPD | Akhir Tahun 2018 |
| IV Pendelegasian Wewenang dan tanggungjawab | | | | |
| 1 | Pengawasan atas pengendalian internal dan risiko | Melakukan reviu bulanan secara berjenjang terhadap kinerja aparatur dibawahnya pada masing- masing SKPD sesuai dengan peraturan tentang penilaian kinerja | Seluruh SKPD | Tahun 2018 |
| V Kebijakan Pengembangan SDM | | | | |
| 1 | Penerimaan dan retensi pegawai pada posisi kunci | Membuat instruksi Walikota untuk mendapatkan perhatian Baperjakat terkait penempatan SDM pada posisi kunci agar disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan | BKD | Triwulan 1 Tahun 2018 |
| VI Pengawasan internal yang efektif | | | | |
| | Pengawasan terhadap pegawai | Memberikan pembinaan dan peringatan terhadap pelanggaran- pelanggaran dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di SKPD | BKD, Inspektorat dan Seluruh SKPD | Tahun 2018 |

| | | | | |
|------------|--|--|--------------|------------|
| VII | Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah | | | |
| | Hubungan Kerja dengan SKPD Terkait | Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan | Seluruh SKPD | Tahun 2018 |

DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI

| NO | Tujuan yang teridentifikasi | Pernyataan Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak pada capaian Tujuan |
|----|---|--|---------------------|---|--|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing serta berbasis masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya keluarga yang tidak sadarzi (sadar gizi) - Masih rendahnya pencapaian pemberian makanan tambahan dan vitamin untuk masyarakat gizi buruk. - Tidak dilaksanakannya Monitoring dan evaluasi gizi masyarakat - Kurang tanggapnya petugas kesehatan dan stekholder lainnya terhadap gizi kurang, kurang vitamin A dan gangguan Yodium | Kasi Gizi dan Kesga | Kesadaran Keluarga terhadap Program Sadarzi | Peningkatan angka kematian ibu, bayi dan sakit |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| 2 | Mewujudkan kualitas SDM kesehatan yang amanah, professional dan tepat guna. | <ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya Sosialisasi peraturan perundang-undangan - Kurangnya bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan | Kasi. Umum dan Kepegawaian | Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan | Rendahnya pengetahuan petugas tentang peraturan perundang-undangan |
| 3 | Mewujudkan sitem informasi dan promosi kesehatan yang berkualitas | <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya ketersediaan media promosi dan informasi kesehatan. - Tidak terlaksananya DAK Bidang Kesehatan pengadaan Sistem Informasi Kesehatan | Kasi Pengelolaan Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi | Sarana dan Prasarana yang belum memadai | Tidak Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan yang Interoprable |
| 4 | Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) pada masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat secara mandiri | <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya penyuluhan masyarakat untuk pola hidup sehat - Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat | Kasi Promkes dan PKBM | Kurangnya kepedulian dan pengetahuan kader dan msyarakat tentang PHBS | Rendahnya persentase capaian program PHBS |

RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

| NO | Tujuan yang teridentifikasi | Pernyataan Risiko | Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan/ Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian | Penanggung jawab Pelaksanaan Perbaikan | Target Waktu Penyelesaian |
|----|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing serta berbasis masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya keluarga yang tidak sadarzi (sadar gizi) - Masih rendahnya pencapaian pemberian makanan tambahan dan vitamin untuk masyarakat gizi buruk. - Tidak dilaksanakannya Monitoring dan evaluasi gizi masyarakat - Kurang tanggapnya petugas kesehatan dan stekholder lainnya terhadap gizi kurang, kurang vitamin A dan gangguan Yodium | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi secara berkesinambungan tentang Sadar Gizi - Memberikan edukasi dan promosi melalui kegiatan PMT dan Vitamin - Melakukan kegiatan monev Gizi Masyarakat - Memberikan edukasi dan promosi melalui kegiatan PMT dan Vitamin A serta gangguan yodium | Kasi Gizi dan Kesga | Setiap hari kerja sepanjang tahun 2018 dengan jadwal kegiatan yang berbeda- beda |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 2 | Mewujudkan kualitas SDM kesehatan yang amanah, professional dan tepat guna. | <ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya Sosialisasi peraturan perundang-undangan - Kurangnya bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan | <ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan. - Memberikan bimtek sinkronisasi peraturan dan perundang-undangan. | Kasi. Umum dan Kepegawaian | Bulan Februari-Desember 2018 |
| 3 | Mewujudkan sitem informasi dan promosi kesehatan yang berkualitas | <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya ketersediaan media promosi dan informasi kesehatan. - Tidak terlaksananya DAK Bidang Kesehatan pengadaan Sistem Informasi Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan kegiatan publikasi dan promosi kesehatan. - Menganggarkan kembali kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Sistem Informasi Kesehatan | Kasi Pengelolaan Kasubag. Keuangan, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi | Setiap hari kerja sepanjang tahun 2018 |
| 4 | Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) pada masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat secara mandiri | <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya penyuluhan masyarakat untuk pola hidup sehat - Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kegiatan penyuluhan masyarakat untuk pola hidup sehat. - Meningkatkan kegiatan publikasi dan promosi PHBS kepada kader dan masyarakat. | Kasi Promkes dan PKBM | Setiap hari kerja sepanjang tahun 2018 |

RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

| NO | Tujuan yang teridentifikasi | Pengendalian Yang Direncanakan | Media/ Bentuk/ Sarana Pengomunikasian | Penyedia Informasi | Penerima informasi | Waktu Pelaksanaan |
|----|---|---|---|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing serta berbasis masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sosialisasi secara berkesinambungan tentang Sadar Gizi dan edukasi dan promosi melalui kegiatan PMT dan Vitamin - Melakukan kegiatan monev Gizi Masyarakat secara terpadu | Melalui Surat Pemberitahuan ke radio, videotron dan social media. | Kasi Gizi dan Kesga | Pihak sekolah, kader dan masyarakat | setiap pelaksanaan kegiatan |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--------------|---|
| | | perundang-undangan | | | |
| 3 | Mewujudkan sitem informasi dan promosi kesehatan yang berkualitas | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan ketersediaan media promosi dan informasi kesehatan. - Mengusulkan dan Melaksanakan DAK Bidang Kesehatan pengadaan Sistem Informasi Kesehatan | Sudah dilaksanakan langsung oleh Kepala Dinas | Kepala Dinas | Dilaksanakan setiap hari kerja sepanjang tahun 2018 |
| 4 | Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) pada masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat secara mandiri | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat untuk pola hidup sehat - Melaksanakan promosi dan edukasi kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat | Sudah dilaksanakan langsung oleh Kepala Dinas | Kepala Dinas | Dilaksanakan setiap hari kerja sepanjang tahun 2018 |